

## **Analisis penerimaan pajak daerah dan pengaruhnya terhadap belanja daerah Provinsi Jambi**

**Zuhri Hariansyah\* ; M. Syurya Hidayat ; Erni Achmad**

Magister Ilmu Ekonomi Fak.Ekonomi dan Binsis Universitas Jambi

*\*E-mail korespondens : zilazhr@gmail.com*

### **Abstract**

*The purpose of this study is to find out and analyze the development of regional tax revenues and regional original revenues of Jambi Province in 2009-2020, to find out and analyze which types of local taxes have the potential to be developed in Jambi Province in 2009-2020, to determine and analyze the effect of indicated local taxes. the potential for regional expenditures in Jambi Province in 2009-2020 and analyze the potential tax increase strategy of Jambi Province. This type of research is quantitative research and the analytical tools used are simple linear regression and SWOT analysis. Based on the results of research on Motor Vehicle Tax and Tax Transfer of Ownership of Motor Vehicles which have the potential to be developed, have a significant effect on regional spending in Jambi Province. Based on the results of the SWOT analysis, it can be concluded that the right strategy to increase the Motor Vehicle Tax and the Transfer of Title Tax for Motor Vehicles which are potential taxes is the SO strategy. The SO strategy is to improve the quality of human resources or apparatus, improve service performance to the community, optimize the use of computer facilities and coordinate with the team to intensify the collection of Motor Vehicle Taxes and Motor Vehicle Transfers.*

**Keywords:** *potential regional taxes, regional original income, regional expenditures, SWOT analysis.*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis perkembangan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah Provinsi Jambi Tahun 2009-2020, mengetahui dan menganalisis jenis pajak daerah manakah yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2020, mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah yang terindikasi potensial tersebut terhadap belanja daerah di Provinsi Jambi Tahun 2009-2020 dan menganalisis strategi peningkatan pajak potensial Provinsi Jambi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dan alat analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi, pertumbuhan dan elastisitas terlihat bahwa pajak daerah yang potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan dari hasil penelitian Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial dikembangkan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil analisis SWOT maka dapat disimpulkan strategi yang tepat untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan pajak potensial adalah pada strategi SO. Adapun strategi SO tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM atau aparatur, meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi pemanfaatan sarana komputer dan koordinasi dengan tim intensifikasi pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

**Kata kunci :** Pajak Daerah Potensial, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Analisis SWOT.

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah sejalan dengan pelimpahan fungsi-fungsi tersebut. Pemerintah daerah mendapat hak di bidang keuangan yang dapat digali sebagai penerimaan keuangan daerah dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan secara langsung dan leluasa. Sumber-sumber keuangan yang dapat digali sebagai penerimaan daerah tidak akan terlepas dari potensi dan modal dasar tersebut berhasil dikelola dan dimanfaatkan mencerminkan seberapa besar penerimaan yang diperoleh. Pengembangan dan pengelolaan secara efektif dan efisien seluruh potensi dan modal dasar yang ada di suatu daerah, memungkinkan terjadinya penerimaan daerah.

Sehubungan dengan adanya otonomi daerah, pemerintah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, bahwa efisiensi dan elastisitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman pemerintah daerah, peluang dan tantangan dan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Otonomi daerah di Provinsi Jambi sudah dijalankan meskipun belum maksimal, maka dari itu pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi yang harus mengembangkan dan mengelola keuangan daerahnya. Otonomi daerah dapat berjalan efektif jika daerah tersebut mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh daerahnya sendiri. Pemerintah pusat bertugas mengontrol dan mengawasi bagaimana pelaksanaan dan perkembangannya. Selain itu daerah dapat menyelenggarakan dan membiayai aktivitas kegiatan-kegiatannya sendiri dengan adanya pendukung sumber-sumber penerimaan daerah ataupun pendapatan daerah yang jelas dan dikelola secara baik dan benar.

Seyogyanya pendanaan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab negara dibiayai dari APBN.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam usaha meningkatkan penerimaan daerah, pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang terbesar dan juga yang terpenting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sebagai tindak lanjut dari usaha peningkatan kemampuan pemerintah dalam mengerahkan dan memanfaatkan hasil-hasil sumber keuangan yang berasal dari potensi daerahnya sendiri, khususnya pajak daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah.

Perkembangan penerimaan pajak di Provinsi Jambi setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Realisasi pada tahun 2014 penerimaan pajak daerah sebesar Rp.1.010.560.585.180.-. Pada tahun 2015 penerimaan pajak daerah menurun menjadi sebesar Rp.1.010.318.979.970.-. Pada tahun 2016 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp.966.519.347.103.-. Pada tahun 2017 penerimaan pajak daerah di Provinsi Jambi mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.1.316.162.467.485.-. Pada Tahun 2018 realisasi pajak daerah di Provinsi Jambi mengalami peningkatan kembali dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.1.374.289.409.975.- Pada Tahun 2019 realisasi pajak daerah di Provinsi Jambi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.1.345.106.684.308.- Pada Tahun 2020 realisasi pajak daerah di Provinsi Jambi mengalami penurunan kembali dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.1.292.729.048.514.-

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus keuangan daerah dan menggali potensi keuangan daerah masing-masing dengan memberikan kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah yang kemudian penerimaan daerah tersebut dipergunakan untuk membiayai pemerintahan daerah tersebut.

Perkembangan belanja daerah di Provinsi Jambi selama tujuh tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2014 realisasi belanja daerah di Provinsi Jambi sebesar Rp.3.012.295.678.000.-. Pada Tahun 2015 belanja daerah meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.3.604.245.243.000.-. Pada Tahun 2016 belanja daerah menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.3.381.884.802.000.-. Pada Tahun 2017 belanja daerah meningkat menjadi sebesar Rp.4.583.486.208.000.-. Pada Tahun 2018 belanja daerah menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.4.515.143.629.000.- Pada Tahun 2019 belanja daerah meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.4.824.366.351.412.-. Pada Tahun 2020 belanja daerah menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.4.430.392.750.898.-

Hidayah (2012) dalam Penelitiannya yang Berjudul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Periode (2006-2010)”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah rata-rata mencapai 14,39% dan 20,02% pertahun. (2) Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD rata-rata mencapai 2,23% dan 56,21% pertahun; sedangkan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD rata-rata mencapai 1,31% dan 4,20% per tahun. (3) Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2006 sampai 2010 dapat dikatakan efektif karena memiliki tingkat efektivitas lebih dari 100%.

Juri (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda”. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda terus meningkat dalam periode Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun 2010. Melihat kontribusi komponen pajak daerah terhadap PAD kota Samarinda sangat fluktuatif, hal ini banyak diakibatkan karena terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu tahun anggaran 2006 sampai tahun 2010.

Dirasmi (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas retribusi Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2012 adalah sebesar 24,69% dan kriterianya tidak efektif karena banyak dari target sumber retribusi yang tidak terealisasi. Pada 2013 sebesar 94,56% efektif dengan kriteria cukup sedangkan pada 2014 sebesar 111,18% dengan kriteria sangat efektif untuk Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal ini Dinas Pendapatan, Keuangan dan Manajemen Aset Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan evaluasi dengan menyiapkan retribusi target pendapatan yang berpotensi diwujudkan. Tingkat efisiensi retribusi Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-2014 sudah termasuk dalam kriteria sangat efisien, karena rasio efisiensi di bawah 10%.

Anggraini (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Hasil Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara statistik membuktikan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil laba BUMD berpengaruh baik secara simultan maupun secara parsial terhadap PAD Kota Surabaya. Pajak daerah menjadi penerimaan yang paling dominan berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

Trisnaningrum (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2014”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan variable penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur berpengaruh secara simultan terhadap PAD. Dari uji F (Fisher) dengan analisis tabel Anova dijelaskan bahwa menunjukkan nilai hasil uji F sebesar 607,214 dengan tingkat signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 dapat dikatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama mempengaruhi variabel PAD.

Supriyanto (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah”. Hasil perhitungan Uji T masing-masing variabel independennya menunjukkan bahwa pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2008-2015 dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah periode 2008-2015.

Hasmin (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah pada Kabupaten Soppeng”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Retribusi Daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng, 2). Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng, 3). Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng.

Usulu (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jaya Pura”.

Berdasarkan hasil penelitian kontribusi dan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura yang disesuaikan dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD, menunjukkan bahwa Kontribusi terbesar selama lima tahun dari 2011 hingga 2015 dari pajak daerah untuk PAD berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dengan rata-rata sebesar 20,01%

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas dan menganalisa perkembangan penerimaan pajak daerah tersebut, melihat pajak potensialnya dan menganalisis pengaruhnya dengan belanja daerah serta menganalisis strategi peningkatannya pajak potensial tersebut. Analisa diatas akan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul “**Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Provinsi Jambi**”

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode analisis data**

Dalam penelitian ini menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif, yaitu analisis yang menguraikan suatu keadaan atau persoalan yang didukung oleh fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dianalisis. Alat analisisnya yaitu: menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif.

### **Perkembangan penerimaan pajak daerah**

Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009-2020, maka pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus pertumbuhan tahunan sebagai berikut :

$$PD_i = \frac{PD_{it} - PD_{it-1}}{PD_{it-1}} \times 100\%$$

Dimana :

- PD<sub>i</sub> = Perkembangan Pajak Daerah Tahun t
- PD<sub>it</sub> = Nilai penerimaan pajak Daerah tahun t
- PD<sub>it-1</sub> = Nilai penerimaan pajak Daerah tahun sebelumnya

### **Jenis pajak daerah potensial untuk dikembangkan**

Untuk mengetahui dan menganalisis jenis pajak daerah manakan yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2020, digunakan rumus sebagai berikut :

Model Kontribusi

$$KPD = \frac{PD}{TPD} \times 100\% \text{ (Sudjana, 2002)}$$

Dimana :

- KPD = Kontribusi pajakdaerah terhadap total pajak daerah diProvinsi Jambi (%)
- PD = Pajak Daerah
- TPD = Total pajak daerah di Provinsi Jambi

Model Pertumbuhan

$$PD_i = \frac{PD_{it} - PD_{it-1}}{PD_{it-1}} \times 100\% \text{ (Sudjana, 2002)}$$

Dimana :

PD<sub>i</sub> = Perkembangan Pajak Daerah Tahun t

PD<sub>it</sub> = Nilai penerimaan pajak Daerah tahun t

PD<sub>it-1</sub> = Nilai penerimaan pajak Daerah tahun sebelumnya

Model Elastisitas

$$ESPPDi = \frac{\% \Delta SPPDi}{\% \Delta PDRB} \text{ (Suparmoko, 2002)}$$

Dimana :

ESPPDi = Elastisitas Sumber Penerimaan Pajak Daerah

%ΔSPPDi = Perubahan Sumber Penerimaan Pajak Daerah tahun i

%ΔPDRB = Perubahan PDRB

Menentukan pajak potensial di Provisnsi Jambi dengan kesimpulan dari 3 perhitungan diatas yaitu kriterinya sebagai berikut :

**Tabel 1** Kriteria pajak potensial

<b>Pajak Daerah</b>	<b>Kontribusi</b>	<b>Rata-Rata Pertumbuhan</b>	<b>Elastisitas</b>	<b>Kesimpulan</b>
Pajak	Tinggi	Tinggi	Elastis	Potensial
Pajak	Tinggi	Rendah	Elastis	Tidak potensial
Pajak	Rendah	Tinggi	Elastis	Tidak potensial
Pajak	Rendah	Rendah	Inelastis	Tidak potensial

**Sumber :** Suparmoko (2002)

**Menganalisis pengaruh potensial pajak daerah terhadap belanja daerah**

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah yang terindikasi potensial tersebut terhadap belanja daerah di Provinsi Jambi Tahun 2009-2020, maka digunakan analisis model regresi sederhana digunakan formulasi sebagai berikut.

$$BD = a + \beta PDi + e$$

Dimana :

BD = Belanja Daerah Provinsi Jambi

PDi = Pajak Daerah di Provinsi Jambi ke i

a = Konstanta

B = Koefisien Regresi

e = Error Term

**Strategi Analisis SWOT**

Untuk menjawab tujuan ketiga yaitu untuk mengetahui strategi peningkatan pajak potensial di Provinsi Jambi, yaitu digunakan rumus analisis SWOT. Adapun responden yang dapat menjawab SWOT adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

Rangkuti (2013), mengemukakan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu

berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Analisis yang digunakan dalam pemberian skor yaitu dengan pemberian peringkat dan penyusunan tabel-tabel Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) dan Matriks Evaluasi Faktor Internal (EFI).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil perhitungan dari ketiga model yaitu model kontribusi, model pertumbuhan dan elastisitas maka ditarik kesimpulan pajak daerah yang potensial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.** Potensi pajak daerah Provinsi Jambi

Pajak Daerah	Kontribusi (%)	Rata-Rata		Kesimpulan
		Pertumbuhan (%)	Elastisitas	
Pajak Kendaraan Bermotor	33,80	9,76	1,28 Elastis	Potensial
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	31,65	9,59	8,10 Elastis	potensial
Pajak Bahan Bakar Bermotor	25,21	9,96	0,53 Inelastis	Tidak potensial
Pajak Air Permukaan	0,12	7,43	2,60 Elastis	Tidak potensial

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan dari tabel diatas terlihat bahwa pajak daerah yang potensial untuk dikembangkan adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, karena dari ketiga model perhitungan yang dilakukan model kontribusi lebih besar dari pajak lainnya dan model pertumbuhan juga paling tertinggi dari pajak lainnya serta model elastisitas pajak kendaraan bermotor dan dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor termasuk dalam kategori elastis. Kemudian pajak bahan bakar bermotor tidak potensial karena kategori elastisitasnya adalah inelastis karena nilainya 0,53 <1. Sedangkan pajak air permukaan tidak potensial karena kontribus pajaknya sangat rendah yaitu 0,12 persen.

**Pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah di Provinsi Jambi**

**Pengaruh pajak potensial kendaran bermotor terhadap belanja daerah**

**Hasil regresi sederhana**

Pada bagian ini akan dipresentasikan pengaruh pajak potensial kendaran bermotor terhadap belanja daerah. Dengan menggunakan persamaan regresi sederhana dan menggunakan program SPSS 22. Sebagai variabel independen (bebas) adalah pajak potensial kendaran bermotor sedangkan variabel dependent adalah Belanja Daerah. Dari persamaan regresi linear sederhana diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

**Tabel 2.** Regresi sederhana pajak kendaraan bermotor

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-786393790739,514	389439410430,776		-2,019	,071
PD	11,648	1,133	,956	10,282	,000

a. Dependent Variable: BD

Sumber : Data diolah, 2021

Dari hasil regresi maka didapat hasil dan diterprestasikan sebagai berikut ini :

$$BD = -786393790739,514 + 11,648PD$$

Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar -786393790739,514 hal ini berarti bahwa jika pajak kendaraan bermotor adalah konstan atau nol atau tidak berubah maka belanja daerah sebesar -786393790739,514 rupiah. Koefisien pajak kendaraan bermotor sebesar 11,648, hal ini berarti setiap peningkatan pajak kendaraan bermotor sebesar 1 rupiah maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 11,648 rupiah dengan asumsi belanja daerah dalam keadaan konstan atau tidak berubah, artinya semakin meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor maka akan meningkatkan pula belanja daerah, hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Afrianty (2014) yang mengatakan bahwa pajak daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

Dari hasil koefisien regresi maka model regresi dapat disederhanakan dan dilakukan uji t dan koefisien determinasi sebagai berikut :

### Uji t

Untuk mengetahui variabel bebas pengaruhnya terhadap variabel terikat, uji t dilakukan dengan membandingkan nilai uji t hitung dengan t tabel. Hasil regresi menunjukkan nilai t hitung untuk variabel pajak daerah adalah sebesar 10,282 dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh t tabel sebesar 1,782 hasil regresi menunjukkan t hitung > t tabel maka dalam hal ini ( $H_0$ ) ditolak dan ( $H_a$ ) diterima yang artinya pajak daerah potensial yaitu pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Jambi. Berpengaruhnya pajak kendaraan bermotor terhadap belanja daerah karena pajak kendaraan bermotor memiliki potensi yang besar. Jumlah kendaraan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan tentunya peningkatan jumlah kendaraan meningkatkan potensi pajak yang dapat digali oleh pemerintah daerah dan dialokasikan untuk belanja daerah.

### Koefisien determinasi

Nilai  $R^2$  menunjukkan seberapa besar proporsi variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui nilai  $R^2$  dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3** Hasil uji determinan

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,956 <sup>a</sup>	,914	,905	367753497185,75550

a. Predictors: (Constant), PD

b. Dependent Variable: BD

Sumber : Data diolah, 2021

Hasil regresi dapat dilihat dari nilai  $R^2$  sebesar 0,914 artinya 91,4 persen belanja daerah dipengaruhi oleh pajak kendaraan bermotor sedangkan sisanya sebesar 8,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Besarnya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor akan berkontribusi besar terhadap realisasi belanja daerah.

**Pengaruh pajak potensial bea balik nama kendaraan bermotor terhadap belanja daerah**

**Hasil regresi sederhana**

Pada bagian ini akan dipresentasikan pengaruh pajak potensial Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap belanja daerah. Dengan menggunakan persamaan regresi sederhana dan menggunakan program SPSS 22. Sebagai variabel independen (bebas) adalah pajak potensial Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sedangkan variabel dependent adalah Belanja Daerah. Dari persamaan regresi linear sederhana diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

**Tabel 4.** Regresi sederhana pajak bea balik nama kendaraan bermotor

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1 (Constant)	-1702434467178,352	661994232594,512		-2,572	,028
PD	16,086	2,181	,919	7,376	,000

a. Dependent Variable: BD

Sumber : Data diolah, 2021

Dari hasil regresi maka didapat hasil dan diterprestasikan sebagai berikut ini :

$$BD = -1702434467178,352 + 16,086PD$$

Nilai konstanta (a) sebesar -1702434467178,352 hal ini berarti bahwa jika pajak kendaraan bermtotor adalah konstan atau nol atau tidak berubah maka belanja daerah sebesar -1702434467178,352 rupiah. Koefesien Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 16,086, hal ini berarti setiap peningkatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 1 rupiah maka akan meningkatkan belaja daerah sebesar 16,086 rupiah dengan asumsi belanja daerah dalam keadaaan konstan atau tidak berubah, artinya semakin meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermtor maka akan meningkatkan pula belanja daerah, hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Afrianty (2014) yang mengatakan bahwa pajak daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

Dari hasil koefesien regresi maka model regresi dapat disederhanakan dan dilakukan uji t dan koefisien determinasi sebagai berikut :

**Uji t**

Untuk mengetahui variabel bebas pengaruhnya terhadap variabel terikat, uji t dilakukan dengan membandingkan nilai uji t hitung dengan t tabel. Hasil regresi menunjukkan nilai t hitung untuk variabel pajak daerah adalah sebesar 7,376 dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh t tabel sebesar 1,782 hasil regresi menunjukkan t hitung > t tabel maka dalam hal ini (Ho) ditolak dan (Ha) diterima yang artinya pajak daerah potensial yaitu Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi JambiBerpengaruhnya Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap belanja daerah karena Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang besar. Banyaknya jual beli kendaraan bekas menjadi potensi pajak bagi pemerintah daerah dalam bentuk Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

**Koefisien determinasi**

Nilai R<sup>2</sup> menunjukkan seberapa besar proporsi variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui nilai Rsquared dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5** Hasil uji determinan

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,919 <sup>a</sup>	,845	,829	492951220419,79600

a. Predictors: (Constant), PD

b. Dependent Variable: BD

Sumber : Data diolah, 2021

Hasil regresi dapat dilihat dari nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,845 artinya 84,5 persen belanja daerah dipengaruhi oleh Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sedangkan sisanya sebesar 15,5 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Besarnya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akan berkontribusi besar terhadap realisasi belanja daerah setelah Pajak Kendaraan Bermotor.

**Implikasi kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pajak yang potensial di kembangkan di Provinsi Jambi adalah pajak kendaraan bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan begitu diharapkan untuk pemerintah untuk mengefektifkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka sebaiknya Samsat Provinsi Jambi perlu mendata ulang semua kendaraan bermotor yang masuk dalam kategori kena pajak, terus menjalankan Program dan Sosialisasi meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak di masyarakat serta meningkatkan kemampuan profesional petugas dalam melaksanakan tugas mereka sehingga diharapkan pemungutan pajak dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Selain itu program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor penting diadakan untuk menarik pembayaran pajak yang tertunda dari wajib pajak.

Meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di UPTD/Samsat dari semua unsur, sehingga untuk kedepannya akan tercapai penerimaan pajak kendaraan bermotor yang optimal dan sistim pelayanan yang memberikan kepuasan kepada wajib pajak.

Memperhatikan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang cukup besar kepada pemerintah daerah Provinsi Jambi diharapkan untuk dapat meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap tahunnya, sehingga akan semakin meningkatkan sumber pendanaan untuk pembangunan daerah.

**Analisis SWOT**

Dalam Strategi peningkatan pajak potensial di penelitian ini maka menggunakan analisis swot. Analisis swot adalah sebuah analisis yang dicetuskan oleh Albert Humprey pada tahun 1960 –1970-an. Analisis Swot merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal (dalam) yaitu *Strengths* (Kekuatan), *Weakness*

(Kelemahan) dan faktor eksternal (luar) yaitu, *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman).

### **Faktor internal**

Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya *strengths* dan *weaknesses* (S dan W). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan maupun organisasi, hal ini ikut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (*decision making*) perusahaan atau organisasi.

#### ***Strengths* (Kekuatan)**

Kekuatan adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, sehingga Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini disebabkan karena Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi memiliki kewenangan. Adapun kekuatan yang mendukung Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam meningkatkan pajak potensial yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah: Adanya Peraturan Daerah & Perundang-undangan Pajak, Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, Ketersediaan SDM / aparat pemungut pajak dan Struktur organisasi telah tersusun berdasarkan Peraturan Daerah.

#### ***Weakness* (Kelemahan)**

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan internal dalam hal sumber daya, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang bagi kinerja pemilik dan peningkatan pajak potensial, adapun kelemahan yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah Kurangnya SDM / pemungut yang profesional, Kurang solidnya koordinasi instansi terkait, Kurang akuratnya data kendaraan, Kurangnya sarana pendukung operasional dan Kurang lengkapnya sarana pendukung seperti komputer dan kendaraan sarana lainnya yang dapat mendukung optimalnya pemungutan pajak.

### **Faktor eksternal**

Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya *Opportunity* dan *Threats* (O dan T). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan dan organisasi yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan maupun organisasi.

#### ***Opportunity* (Peluang)**

Peluang adalah situasi dan kondisi yang berkembang di masa yang akan datang dan kondisi yang menguntungkan dari luar Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, adapun peluang yang dapat ditangkap oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah situasi provinsi cukup aman terkendali, dukungan teknologi cukup memadai, berkembangnya kerjasama antar organisasi pemerintah dan himbauan legislatif dan eksekutif kepada masyarakat agar patuh pajak dan adanya himbauan dari legislatif dan eksekutif kepada masyarakat agar patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

#### ***Ancaman* (Threats)**

Ancaman adalah situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan dari luar perusahaan maupun luar organisasi dan juga dapat mengganggu, Adapun yang menjadi

ancaman bagi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah krisis ekonomi yang berkepanjangan, situasi wilayah yang belum kondusif, kesadaran atau pengetahuan wajib pajak, koordinasi antar instansi terkait kurang mantap dan kurang baiknya koordinasi dengan instansi lain yang terkait.

### Hasil evaluasi faktor internal (EFI)

Hasil evaluasi faktor internal ini didasarkan atas peringkat (rating) dan bobot yang diberikan oleh responden terhadap faktor – faktor internal yang telah ditentukan. Adapun hasil evaluasi faktor internal yang diberikan yaitu:

**Tabel 6** Hasil evaluasi faktor internal (EFI)

No	Faktor Internal Kekuatan (Strength)	Bobot	Rating	Bobot x Rating
1	Adanya Peraturan Daerah & Perundang-undangan Pajak	0,25	4	1,00
2	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	0,10	4	0,40
3	Ketersediaan SDM / Aparat pemungut pajak	0,15	4	0,60
4	Struktur organisasi telah tersusun berdasarkan Peraturan Daerah	0,10	3	0,30
<b>Total Skor Kekuatan (Strength)</b>		<b>0,60</b>		<b>2,30</b>
<b>Kelemahan (Weakness)</b>				
1	Kurangnya SDM / pemungut yang professional	0,15	1	0,15
2	Kurang solidnya koordinasi instansi terkait	0,05	2	0,10
3	Kurang akuratnya data kendaraan	0,10	2	0,20
4	Kurangnya sarana pendukung operasional	0,10	1	0,10
<b>Total Skor Kelemahan (Weakness)</b>		<b>0,40</b>		<b>0,55</b>
<b>Total Kekuatan – Total Kelemahan</b>		<b>1,000</b>		<b>2,85</b>

Sumber : Data Diolah, 2021

Keterangan : Total skor kekuatan (strength) : 2,30  
 Total skor kelemahan (weakness) : 0,55

### Hasil Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)

Hasil evaluasi faktor eksternal ini didasarkan atas peringkat (rating) dan bobot yang diberikan oleh responden terhadap faktor – faktor eksternal yang telah ditentukan. Adapun hasil evaluasi faktor eksternal yang diberikan yaitu :

**Tabel 7** Hasil evaluasi faktor eksternal (EFE)

No	Faktor Eksternal Peluang (Opportunity)	Bobot	Rating	Bobot x Rating
1	Situasi Provinsi cukup aman terkendali	0,15	4	0,60
2	Dukungan teknologi cukup memadai	0,10	3	0,30
3	Berkembangnya kerjasama antar organisasi pemerintah	0,20	4	0,80

4	Himbauan legislatif dan eksekutif kepada masyarakat agar patuh pajak	0,20	4	0,80
<b>Total Skor Peluang (Opportunity)</b>		<b>0,65</b>		<b>2,50</b>
<b>Ancaman (Threats)</b>		<b>Bobot</b>	<b>Rating</b>	<b>Bobot x Rating</b>
1	Krisis ekonomi berkepanjangan	0,10	1	0,10
2	Situasi wilayah yang belum kondusif	0,05	1	0,10
3	Kesadaran atau pengetahuan wajib pajak	0,10	2	0,20
4	Koordinasi antar instansi terkait kurang mantap	0,10	2	0,20
<b>Total Skor Ancaman (Threats)</b>		<b>0,35</b>		<b>0,60</b>
<b>Total Peluang – Total Ancaman</b>		<b>1,000</b>		<b>3,10</b>

Sumber : Data Diolah, 2021

Keterangan : Total skor peluang (opportunity) : 2,50  
 Total skor ancaman (Threats) : 0,60

**Matriks SWOT**

Dengan tersusunnya hasil evaluasi faktor internal (EFI) dan hasil evaluasi faktor eksternal (EFE), maka dibuatlah rumusan matriks SWOT untuk menentukan strategi yang tepat dalam peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial di Provinsi Jambi. Adapun rumusan matriks SWOT berdasarkan hasil evaluasi faktor internal dan eksternal, yaitu :

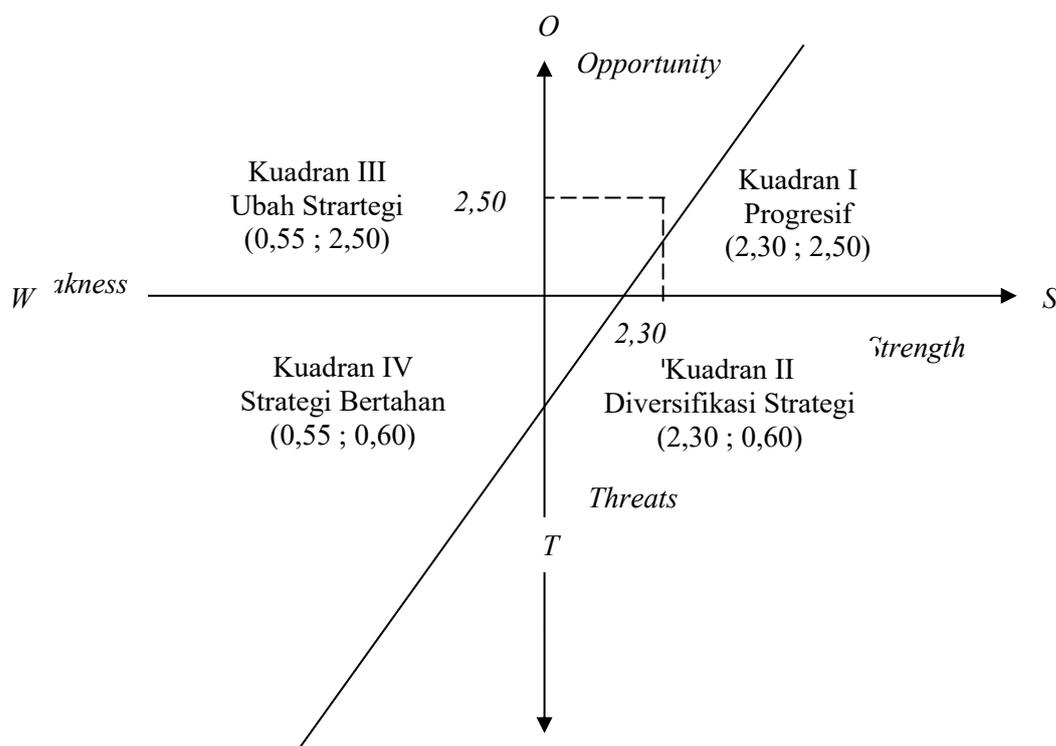
**Tabel 8** Rumusan matriks SWOT

	<b>EFI</b>	<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Kelemahan (W)</b>
<b>EFE</b>			
	<b>Peluang (O)</b>	<b>Strategi SO</b>  SO = 2,30 + 2,50 SO = 4,80	<b>Startegi WO</b>  WO = 0,55 + 2,50 WO = 3,05
	<b>Ancaman (T)</b>	<b>Strategi ST</b>  ST = 2,30 + 0,60 ST = 2,90	<b>Strategi WT</b>  WT = 0,55 + 0,60 WT = 1,15

**Sumber** : Data Diolah, 2021

Dari perhitungan matriks SWOT, maka diperoleh nilai tertinggi adalah SO sebesar 4,80. Dengan demikian nilai yang tertinggi merupakan strategi yang cocok dalam peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial di Provinsi Jambi. Dimana strategi SO yaitu dengan mengoptimalkan kekuatan dan memaksimalkan peluang.

Adapun dalam model analisis SWOT secara kuadran, dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1** Model kuadran analisis matriks SWOT

Berdasarkan Gambar Model Analisis Matriks SWOT di atas, maka rekomendasi strategi yang paling sesuai dengan peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial di Provinsi Jambi pada posisi kuadran 1, yaitu rekomendasi strategi progresif, yang artinya Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi merupakan suatu badan atau organisasi pemerintah yang memiliki kekuatan yang besar dan peluang yang tinggi dalam meningkatkan pajak potensial sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar tingkat pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga meraih kemajuan secara maksimal.

Matriks SWOT adalah matriks yang menginteraksikan faktor strategis internal dan eksternal. Tujuan dibuatnya matriks SWOT adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin tindakan-tindakan atau strategi yang memungkinkan untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hasil analisis matriks SWOT dapat dilihat pada tabel 9 :

**Tabel 9** Matrik analisis SWOT

<b>I N T E R N A L</b>	<b>EXTERNAL</b>		
	<i>Identification of factors</i>	<i>Opportunities (O)</i>	<i>Threats (T)</i>
		1. Situasi Provinsi cukup aman terkendali. 2. Dukungan teknologi cukup memadai 3. Berkembangnya kerjasama antar organisasi pemerintah. 4. Himbauan legislatif dan eksekutif kepada masyarakat agar patuh pajak	1. Krisis ekonomi berkepanjangan. 2. Situasi wilayah yang belum kondusif. 3. Kesadaran atau pengetahuan wajib pajak. 4. Koordinasi antar instansi terkait kurang mantap
	<i>Strength (S)</i>	<b>S vs O</b>	<b>S vs T</b>
	1. Adanya Peraturan Daerah & Perundang-undangan Pajak. 2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. 3. Ketersediaan SDM / Aparat pemungut pajak. 4. Struktur organisasi telah tersusun berdasarkan Peraturan Daerah	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur 2. Peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. 3. Optimalisasi pemanfaatan sarana komputer 4. Koordinasi dengan tim intensifikasi pungutan pajak daerah provinsi terkait.	1. Peningkatan sosialisasi kebijakan pajak kepada masyarakat 2. Koordinasi rapat terbatas dengan instansi terkait 3. Meningkatkan profesionalisme aparat di bidang teknis pelayanan
	<i>Weakness (W)</i>	<b>W vs O</b>	<b>W vs T</b>
1. Kurangnya SDM / pemungut yang profesional. 2. Kurang solidnya koordinasi instansi terkait. 3. Kurang akuratnya data kendaraan. 4. Kurangnya sarana pendukung operasional	1. Pengadaan diklat secara struktural/fungsional. 2. Membangun kesamaan persepsi dan komitmen antar instansi terkait. 3. Pemutakhiran data tiap triwulan 4. Penyempurnaan sarana pendukung	1. Penyempurnaan sistem pungutan pajak 2. Peningkatan kinerja operasional 3. Meningkatkan ketepatan/ kecepatan pelayanan 4. Sosialisasi informasi secara akurat kepada masyarakat	

**Sumber :** Data Diolah, 2021

Berdasarkan analisis swot yang disajikan dalam tabel 9 diatas maka disusun strategi peningkatan pajak potensial adalah sebagai berikut :

*Strategi Strengths Opportunities (SO)*

Strategi ini berupaya untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai peluang-peluang yang ada di luar atau lingkungan eksternal. Strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM atau aparatur, meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi pemanfaatan sarana komputer dan koordinasi dengan tim intensifikasi pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

*Strategi Strengths Threats (ST)*

Strategi ini memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial yaitu dengan meningkatkan

sosialisasi kebijaksanaan pajak kepada masyarakat atau wajib pajak, melakukan rapat terbatas dengan instansi terkait dan meningkatkan profesionalisme aparat dibidang teknis pelayanan.

Strategi *Weakness Opportunities* (WO)

Strategi ini dirancang dengan meminimalkan kelemahan dan berusaha memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang dapat di terapkan dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial yaitu dengan mengadakan diklat atau pelatihan secara struktural dan fungsional, membangun kesamaan persepsi dna komitmen antar instansi terkait, pemutakhiran data setiap triwulan dan penyempurnaan sarana pendukung.

Strategi *Weakness Threats* (WT)

Strategi ini dirancang dengan meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi yang dapat dilakukan meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial yaitu dengan penyempurnaan sistem pemungutan pajak, peningkatan kinerja operasional, meningkatkan ketepatan atau kecepatan pelayanan dan sosialisasi informasi secara akurat kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Rata-rata perkembangan pajak daerah di Provinsi Jambi dari tahun 2009-2020 adalah sebesar 11,58 persen. Rata-rata perkembangan pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi dari tahun 2009-2020 adalah sebesar 11,40 persen. Dari hasil perhitungan kontribusi, pertumbuhan dan elastisitas terlihat bahwa pajak daerah yang potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan dari hasil penelitian Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial dikembangkan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil analisis SWOT maka dapat disimpulkan strtagei yang tepat untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan pajak potensial adalah pada strategi SO. Adapun strategi SO tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM atau aparatur, meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi pemanfaatan sarana komputer dan koordinasi dengan tim intensifikasi pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

### **Saran**

Pemerintah Provinsi Jambi diharapkan pada masa yang akan datang agar terus menerus berupaya memberikan solusi guna lebih meningkatkan komponen penerimaan pajak. Upaya meningkatkan jenis-jenis penerimaan, dilakukan dengan baik melalui indentifikasi objek pajak maupun subjek pajak secara benar dan tepat, penetapan tarif pajak sesuai kondisi terbaru, mengeluarkan izin baru dan menutup objek pajak yang habis masa berlaku kegiatan usahanya serta melakukan pengeloalaan pajak secara lebih efisien dan efektif. Dengan begitu pajak daerah akan meningkat dan pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Berdasarkan dari hasil pajak yang potensial yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diharapkan kepada pemerintah untuk mendata ulang semua kendaraan bermotor yang masuk dalam kategori kena pajak, terus menjalankan Program dan Sosialisasi peningkatan kesadaran membayar pajak pada masyarakat serta meningkatkan kemampuan profesional petugas. Proses sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sebaiknya terus dilakukan karena ini sangat

mempengaruhi dan menentukan tinggi rendahnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pembinaan yang dilakukan dengan penyuluhan-penyuluhan dan himbauan-himbauan yang intensif dan terus menerus seharusnya dilakukan oleh aparat perpajakan untuk mengingatkan para wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak bagi pembiayaan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Proses pengawasan sesuai dengan mekanisme hukum yang diharapkan tidak hanya dilakukan kepada wajib pajak, tetapi juga kepada para petugas pajak itu sendiri, agar tidak terdapat penyalahgunaan hasil penerimaan. Upaya ini sekaligus dapat menekan potensi kecurangan dan korupsi yang ada sehingga tidak merugikan penerimaan pendapatan daerah dan juga tidak merugikan negara. Terlihat Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah diharapkan kepada pemerintah menstabilkan dari perolehan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap tahunnya agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah lalu nanti akan digunakan untuk belanja daerah untuk pembangunan daerah di Provinsi Jambi. Seharusnya pemerintah khususnya Bapeda Provinsi Jambi dapat mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak terutama pajak potensial yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Vivi. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Hasil Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Jurnal Universitas Bhayangkara Surabaya* 2 (1) 1-14
- Dirasmi, Sipti. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Universitas Dehasen Bengkulu* 3 (7) 114-125
- Hasmin, (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah pada Kabupaten Soppeng. *Jurnal STIE Amkop Makasar* 1 (2) 15-26
- Hidayah, Siti Rahmawati. (2012). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Periode (2006-2010). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta* 5 (2) 13-24
- Juri, H. Mat. (2012). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Universitas Negeri Samarinda*
- Lubis, A.J.R., Parmadi, P., & Aminah, S. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* 6 (3), 97-104
- Rahmadi, S., Parmadi, P. (2019). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Antar Pulau di Indonesia, *Jurnal Paradigma Ekonomika* 14 (2), 55-66, DOI: <https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i2.6948>
- Rangkuti, Freddy. (2013). *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Sudjana. (2002). *Metode statistika*. Tarsito : Bandung
- Suparmoko, (2002). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. BPFE : Yogyakarta.

- Supriyanto, Agus. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Universitas Pandaran Semarang* 5 (1) 1-14
- Trisnaningrum, Nila. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2014. *Jurnal Universitas Surabaya* 3 (5) 76-87
- Ussulu, Elvira M. (2017). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jaya Pura. *Jurnal Universitas Jayapura* 1 (3) 25-37